

## **Kebijakan Hak Asasi Manusia Grup Apical**

### **1. Pengantar<sup>1</sup>**

Grup Apical (selanjutnya disebut 'Apical') dengan tegas meyakini bahwa kami mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang mendasar dalam menjalankan bisnis kami di seluruh operasi global dan rantai pasokan. Kebijakan ini merupakan tambahan terhadap [Kebijakan Keberlanjutan Grup Apical](#), dan kedua kebijakan ini seharusnya diinterpretasikan bersama dengan [Glosarium Kebijakan](#) yang berisikan definisi-definisi istilah penting.

### **2. Pengaturan & Lingkup**

Dewan Direksi Grup Apical adalah badan pengatur tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi strategi keberlanjutan dan kinerja kami serta memastikan pemenuhan komitmen kami. Sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Keberlanjutan kami, kebijakan ini mencakup operasi kami sendiri, perusahaan patungan, anak perusahaan, pemasok langsung maupun tidak langsung dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit kami.

### **3. Komitmen Utama Kami**

Apical berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan memanfaatkan kehadiran bisnis global kami untuk mempengaruhi perubahan dan memberikan dampak positif bagi Hak Asasi Manusia Pribumi, masyarakat lokal, dan pekerja. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk yang termaktub dalam Piagam Hak Asasi Manusia Internasional dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja. Kami juga tunduk pada Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs)<sup>2</sup> serta kami mengikuti Pedoman Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk Perusahaan Multinasional serta sepuluh prinsip Global Compact PBB.

Kami juga menyadari adanya kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan<sup>3</sup> yang mungkin lebih berisiko terpengaruh secara merugikan oleh operasi kami atau rantai pasokan kami. Oleh karena itu, kami akan mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP), Konvensi tentang Masyarakat Pribumi

---

<sup>1</sup> Untuk informasi lebih lanjut cek [Kebijakan Keberlanjutan Apical Group](#) – Bagian Tata Kelola dan Ruang Lingkup

<sup>2</sup> Berisi tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

<sup>3</sup> Termasuk (namun tidak terbatas pada) wanita, anak-anak, keagamaan, etnis minoritas, penduduk lokal, lingkungan hidup, pembela hak asasi manusia dan tenaga kerja asing

dan Suku Asli, Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC).

Kami berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan nasional dan internasional yang berlaku selama operasi kami. Jika terdapat perbedaan antara hukum nasional dan internasional, Apical akan berupaya untuk mematuhi standar tertinggi yang berlaku.

Dalam menghadapi perkembangan legislasi internasional yang menuntut perusahaan menghapus tenaga kerja paksa dan memperkuat proses penelitian untuk memastikan risiko dan dampak hak asasi manusia ditangani secara efektif dalam operasi dan rantai pasokan, Apical akan terus memantau dan memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan proses kami kokoh dan sesuai dengan persyaratan baru ini.

### **3.1 Hak-Hak Buruh**

Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak semua pekerja dengan memastikan hal berikut:

- i. Tidak ada tenaga kerja paksa<sup>4</sup>, termasuk perdagangan manusia, hutang paksa, dan perbudakan.
- ii. Tidak ada pekerja anak.
- iii. Implementasi efektif praktik perekrutan etis, termasuk tanpa pembayaran biaya perekrutan.
- iv. Tidak ada penyitaan paspor pekerja (atau dokumen identitas lainnya).
- v. Tidak ada pembatasan gerak bagi pekerja.
- vi. Tidak ada penggantian kontrak.
- vii. Upah yang memenuhi atau melebihi upah minimum yang diatur oleh hukum untuk membantu pekerja dan keluarga mereka mencapai standar hidup yang layak.
- viii. Kebebasan pekerja untuk mengundurkan diri.
- ix. Tidak ada hukuman atas pemutusan hubungan kerja.
- x. Tidak ada penahanan upah.
- xi. Upah dibayar secara teratur dan tepat waktu. Upah akan dibagikan secara adil untuk pekerjaan yang setara, dan semua potongan yang sah harus dinyatakan dengan jelas dan dipahami oleh pekerja.
- xii. Jam kerja dan lembur sesuai dengan standar nasional. Semua lembur yang dilakukan oleh pekerja bersifat sukarela dan akan dibayar dengan adil.
- xiii. Kondisi kerja/lingkungan kerja aman, dan tidak ada risiko kesehatan yang tidak semestinya.

---

<sup>4</sup> Sejalan dengan 11 indikator pada ILO Forced Labour

- xiv. Perumahan yang memadai disediakan jika diperlukan, sesuai dengan standar nasional atau panduan ILO dan memenuhi standar kebersihan yang memadai.
- xv. Tidak ada diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk (namun tidak terbatas pada) ras, asal, jenis kelamin, agama, usia, orientasi seksual, kewarganegaraan, pandangan politik, atau keterlibatan dalam serikat pekerja.
- xvi. Tidak ada pelecehan, penyalahgunaan, atau kekerasan, termasuk fisik, psikologis, verbal, seksual, atau ancaman. Tidak boleh ada penggunaan hukuman fisik.
- xvii. Penciptaan lingkungan kerja yang lebih inklusif melalui promosi keragaman dan kesetaraan gender.
- xviii. Hak-hak reproduksi pekerja dihormati.
- xix. Hak-hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dihormati. Dalam keadaan di mana hak-hak pekerja untuk melakukan perundingan kolektif dibatasi oleh hukum nasional, kami akan mengikuti praktik terbaik internasional dalam perundingan kolektif. Pekerja akan menerima semua manfaat yang dijelaskan oleh hukum nasional dan perjanjian perundingan kolektif mereka.

### **3.2 Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (MA dan ML)**

Apical menghormati keragaman masyarakat adat dan masyarakat lokal, mengakui kepentingan unik dan penting yang mereka miliki dalam ekosistem mereka serta sejarah, budaya, dan tradisi mereka.

Kami mengakui dan menghormati hak-hak MA dan ML sebagaimana dilindungi dalam UNDRIP dan Konvensi Masyarakat Adat dan Suku-Suku Asli. Ini mencakup, antara lain, hak atas tanah<sup>5</sup>, sumber daya, budaya, penentuan nasib sendiri, pemerintahan sendiri, lingkungan yang sehat, dan tanpa diskriminasi. Kami akan berupaya memastikan bahwa setiap akuisisi, penggunaan, atau pengembangan lahan untuk pengembangan kelapa sawit tidak merugikan pemilik hak dan pengguna yang mencakup orang-orang dari tanah di mana mereka memiliki hak hukum, komunal, atau adat yang dapat ditunjukkan.

Kami akan terus berkomunikasi dengan komunitas di sekitar operasi kami dan berupaya memahami dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas kami untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk kesejahteraan MA dan ML.

---

<sup>5</sup> Hal ini mengacu pada hak adat, hak hukum, hak pengguna dan hak yang dapat dibuktikan sebagaimana didefinisikan dalam P&C RSPO dan Panduan FPIC.

Kami berkomitmen untuk menghormati hak MA dan ML untuk memberikan atau menolak Izin Bebas, Sebelumnya, dan Dengan Informasi (FPIC) untuk aktivitas pengembangan yang mempengaruhi tanah, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. FPIC akan dicari untuk operasi berkelanjutan dari perkebunan yang sudah ada dan diperoleh sebelum dimulainya pengembangan yang diajukan. Kami meminta hal yang sama dari pemasok kami dan akan berkolaborasi dengan mereka untuk memastikan proses FPIC dipahami, diimplementasikan dengan benar sesuai dengan norma internasional, dan terus ditingkatkan dalam sektor minyak kelapa sawit<sup>6</sup>.

### **3.3 Pembela Hak Asasi Manusia (HRD)**

Kami menghormati hak HRD untuk dengan aman mengangkat masalah dan keprihatinan tentang dampak operasi kami dan pemasok kami dan berkomitmen untuk terlibat secara terbuka dan konstruktif dengan HRD. Apical tidak akan mentoleransi ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, atau balasan terhadap HRD. Kami berkomitmen untuk mengatasi dampak merugikan terhadap HRD yang disebabkan oleh operasi kami atau sebagai akibat dari tindakan dari dalam rantai pasokan kami, sesuai dengan pengaruh kami dan sesuai dengan UNGPs<sup>7</sup>.

## **4. Implementasi, pemantauan, dan pelaporan**

Apical akan memperkuat kerangka keberlanjutan yang sudah ada dengan target, capaian, dan indikator kinerja yang jelas dalam hal hak asasi manusia untuk menegaskan komitmen kami terhadap kebijakan ini. Kami akan melakukan proses Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD) untuk:

- i. Mengidentifikasi dan menilai dampak merugikan.
- ii. Mencegah & mengurangnya.
- iii. Melacak/memonitor.
- iv. Berkomunikasi.
- v. Mengatasi kontribusi apapun terhadap dampak hak asasi manusia merugikan dalam operasi dan rantai pasokan kami.

Kami akan secara berkala meninjau dan memperbarui kemajuan upaya kami, dan secara tahunan akan mengkomunikasikan hasilnya melalui Laporan Keberlanjutan kami.

Apical akan terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memastikan implementasi efektif dari Kebijakan Hak Asasi Manusia ini.

---

<sup>6</sup> Kami akan berpedoman pada Panduan FPIC dari RSPO dan Persyaratan Sosial HCSA serta Panduan Penerapannya dan kami mendorong pemasok untuk menerapkan hal yang sama di seluruh operasi mereka..

<sup>7</sup> Sejalan dengan [UN Declaration on Human Rights Defenders](#) dan RSPO [Policy on the Protection of Human Rights Defenders, Whistle-blowers, Complainants and Community Spokespersons](#)



Saat ini, kami berpartisipasi dalam inisiatif dan platform multi-pemangku kepentingan seperti RSPO dan Kelompok Kolaborasi Minyak Kelapa Sawit (POCG), dan kami terbuka untuk mendukung inisiatif yang berkaitan dengan landscape atau sektoral yang akan membantu kami mencapai tujuan kebijakan ini.

Kami akan bekerja dengan pemasok kami untuk memenuhi persyaratan kebijakan ini dan untuk menyebarkannya di rantai pasokan kami. Jika kami mengidentifikasi bahwa dampak hak asasi manusia merugikan telah terjadi, kami akan terlibat dalam proses pemulihan yang sesuai, termasuk kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

#### **5. Hak untuk Memperoleh Ganti Rugi**

Pemegang hak akan berusaha untuk memperoleh hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme keluhan yang diatur dalam [Kebijakan Keberlanjutan Grup Apical](#).